

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



NAMA : RAHMAWATI
NIM : 222012256

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

**PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**NAMA : RAHMAWATI
NIM : 222012256**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAWATI

NIM : 222012256

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, Maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 01 Agustus 2016

Penulis,


Rahmawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Rahmawati
NIM : 222012256
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal...6-10-2016

Pembimbing



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0206046303/784021

Mengetahui,

Dekan

U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK.CA
NIDN : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ *“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.” (QS. Al-Jora’:7)*
- ❖ *“Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya kejam.” (RA Kartini)*
- ❖ *“Jangan nilai orang dari masa lalunya karena kita semua sudah tidak hidup disana. Semua orang bisa berubah, biarkan mereka membuktikannya.” (Penulis)*

Persembahkan :

- *Kedua Orang Tuaku Tercinta (Alm. Rahmat dan Satini)*
- *Kelima Saudoraku Terkasih*
- *Dosen Pembimbingku*
- *Almamater Tercinta*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarokatuh

Alhamdulillahirabbil alamiin, Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang yang tiada henti memberikan rahmat dan karunianya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**. Skripsi tersebut untuk mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak akan selesai pada waktunya tanpa dorongan, dukungan, dan bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahku Alm. Rohmat dan Ibuku Satini yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan semangat serta kasih sayang yang begitu besar dan luar biasa kepada penulis, karena penulisan skripsi ini tidak akan pernah terjadi tanpa adanya bimbingan kedua orangtuaku. Serta saudara, adik dan kakak yang tak hentinya memberikan dukungan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs.Sunardi,S.E.M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Bapak Fauzi Ridwan,.M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E,. M.Si,.AK. CA dan Bapak Mizan, S.E,. M.Si.AK.CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mohammad Fahmi,S.E,.M.Si selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Teman-Teman Seperjuangan FEB-UMP 2012.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadah mendapat balasan Allah SWT. Amiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN DAFTAR GRAFIK.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. PENELITIAN SEBELUMNYA	10
B. LANDASAN TEORI	
1. Laporan keuangan.....	14
2. Tujuan Laporan keuangan	14
3. Kinerja Keuangan Daerah	15
4. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	19
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. JENIS PENELITIAN	26
B. LOKASI PENELITIAN	27

C. OPERASIONALISASI VARIABEL	27
D. DATA YANG DIPERLUKAN.....	27
E. METODE PENGUMPULAN DATA	28
F. ANALISIS DATA DAN TEKNIS ANALISIS	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. DATA UMUM.....	31
a. Gambaran Umum Provinsi Sumatera selatan.....	31
b. Sejarah DJPK.....	34
2. DATA KHUSUS.....	39
a. Data APBD/Realisasi Kabupaten/kota di provinsi sumsel	39

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Rasio Efektivitas PAD.....	42
2. Rasio Keserasian.....	46
a. Rasio Belanja Operasi	46
b. Rasio Belanja Modal	49
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	53
4. Kabupaten/Kota yang memiliki Kinerja Paling Baik	58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN.....	60
B. SARAN.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 PAD, Pendapatan Transfer,Belanja Modal,Jumlah Penduduk, Jumlah Anggota Dewan	6
Tabel II.1 Penelitian sebelumnya.....	13
Table II.2 Pola Hubungan dan Tingkat kemampuan daerah	26
Tabel III.1 Operasionalisasi variable.....	29
Tabel IV.1 Peta Sumatera Selatan	36
Table IV.2 Data APBD/Realisasi APBD	41
Table IV.3 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD	43
Table IV.4 Perhitungan Rasio Belanja Operasi.....	47
Table IV.5 Perhitungan Rasio Belanja Modal	50
Tabel IV.6 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ..	54
Tabel IV.8 Keseluruhan Rasio	58

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Gravik IV.1 Rasio Efektivitas PAD	44
Gravik IV.2 Rasio Belanja Operasi.....	48
Gravik IV.3 Rasio Belanja Modal.....	51
Gravik IV.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data APBD dan Realisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014
- Lampiran 2 Sertifikat Hafalan Surat-Surat Pendek
- Lampiran 3 Sertifikat Toefl
- Lampiran 4 Surat Riset
- Lampiran 5 Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Jadwal Penelitian
- Lampiran 7 Tanda Pengesahan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Terjemahan Abstrak
- Lampiran 9 Biodata

Rahmawati/222012256/Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kesenjangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah? 2) Kabupaten/Kota Manakah yang memiliki Kinerja keuangan paling baik?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Perbandingan Kinerja Keuangan kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kesenjangan, dan rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 2) Kabupaten/Kota yang memiliki Kinerja Keuangan paling baik. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif. Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kesenjangan, dan Rasio Kemandirian keuangan Daerah.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di provinsi sumatera selatan jika dilihat dari (1) rasio efektivitas PAD dikategorikan efektif karena rata-rata efektivitasnya sebesar 94,22%. (2) Rasio Kesenjangan dapat dikatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk belanja operasi daerah yaitu sebesar 68,14% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 31,15%. (3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 6,33%.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan daerah, Rasio efektivitas PAD, Rasio Kesenjangan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

ABSTRACT

Rahmawati/222012256/The Financial Performance Comparison of Districts/Cities in South Sumatera Province

The formulations of the problem in this study were how the financial performance comparison of districts/cities in South Sumatera Province from PAD Effectiveness Ratio, Harmony Ratio, Regional Financial Independence Ratio and what districts/ cities which has the best financial performance. This study was to find out the financial performance comparison of districts/cities in South Sumatera Province from PAD Effectiveness Ratio, Harmony Ratio, Regional Financial Independence Ratio and districts/ cities which has the best financial performance. This study was comparative study. This study was conducted at Directorate-General of Regional Fiscal Balance. Financial Department. The result of this study found that from PAD Effectiveness Ratio, the financial performance of districts/cities in South Sumatera Province was effective. It could be seen from effectiveness average was 94.22%. Furthermore, Harmony Ratio found that the government of districts/cities in South Sumatra allocated 68.14% of the budget for regional operating expenditure compared with 31.15% of capital spending average. Financial Independence Ratio was very low. Moreover, it had instructive correlation pattern because the average ratio was 6.33%.

Key Words : *Regional Financial Performance, PAD Effectiveness Ratio, Harmony Ratio, and Regional Financial Independence Ratio*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut berupa: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, infrastruktur, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: Penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).

Undang-undang No.17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan, yang meliputi : Laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Dilampiri Laporan Keuangan Negara/Daerah dan badan lainnya, Disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah melakukan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Usaha reformasi keuangan negara mencakup: Peraturan Perundang-undangan,

Kelembagaan, sistem dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisiensi serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit unit kerja didalamnya (Mahmudi, 2010: 231). Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkan analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satu yang paling banyak digunakan adalah rasio keuangan.

Menurut Abdul Halim (2012: L-4) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010: 143). Rasio Kesenjangan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara

optimal. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Beberapa permasalahan keuangan yang terjadi pada pemerintah Sumatera Selatan antara lain: 1) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah. 2) Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relative kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. 3) Kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada. 4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. (Pramita, 2015).

Berikut dapat dilihat data Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Jumlah Anggota Dewan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Tabel I.1
PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Jumlah Anggota Dewan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Tahun 2014

No.	KABUPATEN / KOTA	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH PENDUDUK (Orang)	JUMLAH ANGGOTA DEWAN (Orang)
1	Kabupaten Lahat	125.319.000.000	1.146.946.000.000	369.550.000.000	389.034	40
2	Kabupaten Musi Banyuasin	172.925.000.000	2.852.283.000.000	1.377.481.000.000	602.027	45
3	Kabupaten Musi Rawas	120.153.000.000	1.005.661.000.000	413.464.000.000	378.987	40
4	Kabupaten Muara Enim	138.706.000.000	1.613.012.000.000	634.279.000.000	590.975	45
5	Kabupaten OKI	145.591.000.000	1.296.515.000.000	444.998.000.000	776.263	45
6	Kabupaten OKU	79.344.000.000	913.783.000.000	290.864.000.000	344.932	35
7	Kota Palembang	734.219.000.000	2.094.810.000.000	618.887.000.000	1.558.494	50
8	Kota Lubuk Linggau	50.181.000.000	681.430.000.000	295.111.000.000	216.270	30
9	Kabupaten Banyuasin	106.918.000.000	1.316.854.000.000	653.603.000.000	799.998	45
10	Kabupaten Ogan Ilir	49.061.000.000	916.616.000.000	334.233.000.000	403.828	40
11	Kabupaten OKU Timur	62.418.000.000	1.126.467.000.000	238.864.000.000	642.206	45
12	Kabupaten Empat Lawang	32.656.000.000	748.741.000.000	365.015.000.000	234.880	35
13	Kabupaten Pali	8.903.000.000	319.965.000.000	237.231.000.000	176.936	25
14	Kabupaten Muratara	21.350.000.000	545.766.000.000	355.726.000.000	180.266	25

Sumber :Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014

Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan harus lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur mulai teratasi. Memang kebanyakan kota-kota kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan berbagai penyimpangan, yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Lembaga Legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Sumarjo, 2010). Lembaga Legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik (Hamzah, 2009). Sumarjo (2010) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang akhirnya terbentuk titik temu bahwa semakin besar anggota legislatif maka semakin besar pula kinerja pemerintah daerah atau sebaliknya.

Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan social dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio keserasian dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
- b. Kabupaten/kota manakah yang memiliki Kinerja Keuangan paling baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Kabupaten/kota yang memiliki Kinerja Keuangan paling baik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan digunakan untuk menambah wawasan tentang laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran pemerintah daerah sumatera selatan di dalam menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

c. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi serta menambah wawasan dan menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Joko Pramono(2014) yang berjudul analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah kinerja Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2011 dan 2010 berdasarkan analisis rasio keuangan. Sejauh mana Pemerintah Kota Surakarta bisa melaksanakan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber dayanya. Tujuannya untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta selama tahun 2010 dan 2011. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola Sumber dayanya selama tahun 2010 dan 2011. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, Rasio Belanja Rutin terhadap APBD, Rasio Belanja Modal terhadap APBD dan Rasio DSCR. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kota Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini adalah Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 % (2010) dan 24,44% (2011)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fidelius(2013) yang berjudul Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah Kota Manado Berdasarkan Analisis Rasio Kinerja Keuangan. Tujuannya mengetahui Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado Berdasarkan Analisis Rasio Kinerja Keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Aktivitas, Rasio Pengelolaan Belanja dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan tinjauan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah rasio kemandirian Kota Manado memperlihatkan peningkatan yang baik setiap tahunnya. Kinerja pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado berdasarkan analisis kemandirian keuangan masih sangat rendah yang berarti bahwa kontribusi PAD masih sangat kecil dalam APBD serta campur tangan pemerintah pusat masih sangat dominan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti Rochmah Ika(2012) yang berjudul Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Provinsi DIY sebelum dan sesudah

diberlakukannya otonomi daerah. Tujuannya untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah DIY sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Efisiensi Belanja, Rasio PAD, Rasio Kemandirian Keuangan,.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis tren. Hasil Penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis tren Provinsi DIY tidak akan mengalami peningkatan, diperkirakan beban belanja akan terus meningkat. Sehingga akan semakin sulit untuk mencapai tingkat efisiensi.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya.

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Rasio keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta), Joko Pramono (2014)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel yang digunakan sama sama menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian .	Penelitian ini menggunakan Variabel DSCR sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan DSCR. Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta sedangkan penelitian yang akan dilakukan dikab/kota provinsi Sumatera Selatan.
2.	Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado, Fidelius (2013).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis rasio kemandirian untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menggunakan variabel Rasio pengelolaan belanja sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan Rasio pengelolaan belanja. Tahun penelitian serta lokasi penelitian berbeda.
3.	Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah, Siti Rochmah Ika(2012)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama sama menggunakan Rasio PAD, Rasio Kemandirian.	penelitian ini menggunakan analisis trend sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan analisis trend

Sumber: Penulis 2016

B. Landasan Teori

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian daya keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi(aktiva) dan/atau kewajiban selama satu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah (Patriati, 2010: 243)

2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatanmya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraph 21). Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran , antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakainya (Patriati, 2010: 245).

3. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tertentu. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan (Suyono dalam Patriati, 2010).

4. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mohammad Mahsun (2012: 25) Kinerja Keuangan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Bastian(2006) mendefinisikan sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu .Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi(Hamzah, 2008). Pengukuran kinerja(*Performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan pencapaian kegiatan khususnya kemajuan atas tujuan yang telah direncanakan.

Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oesti Agustina (2013: 3) dalam jurnalnya.Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran . Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang berbentuk dari unsur Laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan daerah

Tujuan pengukuran kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Mardiasmo (2012 : 121) adalah memenuhi tiga maksud , yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- 2) Untuk mengalokasikan Sumber daya dan Pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan

yaitu sebagai berikut : a) pajak daerah, b) Retribusi daerah, c) Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, d) lain-lain pendapatan yang sah (Abdul Halim,2012: 101)

2) Pendapatan Transfer

Abdul Halim (2012, 105) Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Sebelum munculnya permendagri No. 13 Tahun 2006, kelompok pendapatan ini terbatas pada dana perimbangan saja. Setelah peraturan ini muncul, terdapat transfer dana lain diluar dana perimbangan. Kelompok pendapatan berupa pendapatan transfer ini digolongkan menjadi 2 jenis pendapatan yaitu (untuk provinsi) dan menjadi 3 jenis pendapatan (untuk kabupaten/kota), yaitu sebagai berikut:

a) Transfer pemerintah pusat- dana perimbangan, meliputi:

- (1) Dana bagi hasil pajak
- (2) Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)
- (3) Dana alokasi umum
- (4) Dana alokasi khusus

b) Transfer dana pusat-lainnya, meliputi:

- (1) Dana otonomi khusus
- (2) Dana pentasuaian

c) Transfer pemerintah provinsi, meliputi:

- (1) Pendapatan bagi hasil pajak
- (2) Pendapatan bagi hasil lainnya.

3) Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Abdul Halim, 2012: 107). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Asset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu kerja, bukan untuk dijual (Putro, 2010)

4) Ukuran Legislatif

Lembaga Legislatif/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna&Marni, 2007). Lembaga Legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik (Hamzah, 2009).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atau anggota legislative bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010). Lembaga legislatif mempunyai peranan dalam pembuatan kebijakan public termasuk penganggaran daerah (Abdullah dan Asmara, 2006). Lembaga legislative harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik.

5) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk juga mempengaruhi belanja daerah, jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan di pandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan, sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional.

Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan social dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Sumarjo, 2010).

4. Analisis Kinerja Keuangan daerah

Menurut Helfert(1982) dalam Mohammad Mahsun(2012 : 135) analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisiensi dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim, 2012: L- 4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio

keuangan daerah lain yang terdekat auatupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut teradap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah sebagai berikut : DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor (Abdul Halim, 2012: L-4)

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dnegan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang digunakan adalah. Rasio efektivitas PAD, Rasio efektivitas Keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2010: 143) Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandngkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efektivitas menurut Mohammad mahsun(2012: 187), adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

b. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannyasecara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (Belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Abdul Halim 2012: 236). Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini yaitu: Rasio Belanja Operasi dan rasio belanja modal.

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara

60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Mahmudi, 2010 : 164). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{TotalBelanjaOperasi}}{\text{TotalBelanjaDaerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi 2010: 164). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{TotalBelanjaModal}}{\text{TotalBelanjaDaerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan)

yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Abdul halim, 2007: 5) Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{PendapatanTransfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio

kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.2
Pola Hubungan dan tingkat kemampuan daerah.

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber :Reksohadiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013: 82)

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola Hubungan partisipatif yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasinya terdiri dari tiga jenis penelitian (Sugiyono, 2014: 6)

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau dengan menghubungkan dengan variabel lain.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Kedua variabel bisa jadi tidak berhubungan atau mandiri.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Komparatif yaitu penulis akan melakukan perbandingan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat daerah Jakarta. Yang beralamat di Jl. DR. Wahidin No.1 gedung Radius Prawiro lantai 9, Jakarta Pusat, 10710. <http://djpk.depkeu.go.id>.

C. Operasional Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya	- Rasio Efektivitas PAD - Rasio Keserasian - Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Penulis 2016

D. Data yang diperlukan

Menurut Nur & Bambang (2009 : 146-147) menyatakan data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1) Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data non keuangan seperti jumlah anggota DPRD dan Jumlah Penduduk.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono(2014: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1) *Interview* (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian.

2) Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara meminta data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga sama dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data dan Teknis Analisis

1) Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data yang diangkakan.

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data yang kemudian akan dijelaskan dengan kalimat-kalimat.

2) Teknik Analisis

Sugiyono (2014: 334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan

1) Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km². Batas batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Secara topografi, wilayah Provinsi Sumatera Selatan di pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat bukti barisan yang membelah Sumatera

Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 - 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.

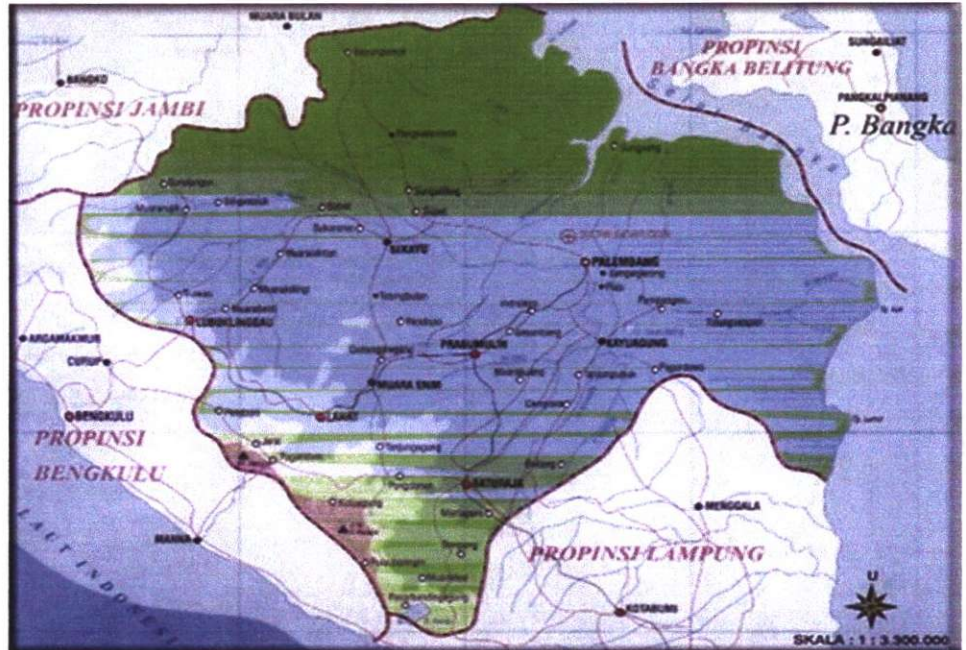
Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tigabelas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

Berdasarkan harga berlaku dengan migas, terdapat empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2010, empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada Tahun 2010 kontribusi masing-masing sektor diatas secara berurutan adalah 23,67%, 21,62%, 16,85%, 12,70%.

Sebagai salah satu provinsi tujuan investasi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya adalah Bandara S.M. Badaruddin II yang terdapat di Kota Palembang, Bandara Tanjung Enim di Kabupaten Muara Enim, Bandara Banding Agung yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pelabuhan Palembang yang terletak di Kota Palembang juga Pelabuhan Khusus Kertapati di Kabupaten Muara Enim.

2) Pemerintahan

Table IV.1
Peta Sumatera Selatan



Sumber : Google

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 Kabupaten / Kota, Yaitu: Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Oku Selatan, Oku Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Panukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas

16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

b. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

1) Sejarah

Dibentuk sesuai amanat Pasal 18A UUD 1945, Pasal 2d, 2e dan 2f Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut mengingat peta pengelolaan keuangan mengikuti kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dimana jumlah dana yang disalurkan ke daerah melalui pos Belanja Untuk Daerah dalam APBN cenderung meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan saat ini, tidak ada unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang ditugaskan menangani secara khusus pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan merupakan penggabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan

Kerjasama Internasional (BAPPEKI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya unit baru tersebut diharapkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat lebih focus dan terarah sejalan dengan skenario (road map) yang telah dicanangkan.

2) Visi dan Misi

VISI

Dalam mengemban tugas dan fungsi, DJPK mempunyai Visi :

”Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah Berkelas Dunia Yang Adil dan Transparan.”

MISI

Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, DJPK melaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel.

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.
- c. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

3) Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan merupakan pengabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya unit baru tersebut diharapkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat lebih focus dan terarah sejalan dengan skenario (*road map*) yang telah dicanangkan. Mempunyai tugas pokok “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

2. Data Khusus

Tabel IV.2
Data APBD/Realisasi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Total Belanja Modal (Rp)	Pendapatan Transfer
1	Kab. Lahat	125.319.000.000	79.066.000.000	681.541.000.000	1.388.480.000.000	369.550.000.000	1.146.946.000.000
2	Kab. Musi Banyuasin	172.925.000.000	129.225.000.000	1.156.215.000.000	3.517.904.000.000	1.377.481.000.000	2.852.283.000.000
3	Kab. Musi Rawas	120.153.000.000	81.732.000.000	805.210.000.000	1.218.716.000.000	413.464.000.000	1.005.661.000.000
4	Kab. Muara Enim	138.706.000.000	133.627.000.000	1.149.353.000.000	1.783.782.000.000	634.279.000.000	1.613.012.000.000
5	Kab. OKI	145.591.000.000	62.449.000.000	1.015.317.000.000	1.460.390.000.000	444.998.000.000	1.296.515.000.000
6	Kab. OKU	79.344.000.000	68.959.000.000	740.870.000.000	1.031.869.000.000	290.864.000.000	913.783.000.000
7	Kota Palembang	734.219.000.000	684.480.000.000	2.192.486.000.000	2.812.465.000.000	618.887.000.000	2.094.810.000.000
8	Kota Lubuk Linggau	50.181.000.000	51.603.000.000	369.692.000.000	896.993.000.000	295.111.000.000	681.430.000.000
9	Kab. Banyuasin	106.918.000.000	63.873.000.000	666.983.000.000	1.915.163.000.000	653.603.000.000	1.316.854.000.000
10	Kab. Ogan Ilir	49.061.000.000	95.980.000.000	485.875.000.000	990.877.000.000	334.233.000.000	916.616.000.000
11	Kab. OKU Timur	62.418.000.000	36.918.000.000	921.943.000.000	1.161.250.000.000	238.864.000.000	1.126.467.000.000
12	Kab. Empat Lawang	32.656.000.000	20.000.000.000	415.919.000.000	801.818.000.000	365.015.000.000	748.741.000.000
13	Kab. Pali	8.903.000.000	21.215.000.000	205.986.000.000	443.217.000.000	237.231.000.000	319.965.000.000
14	Kab. Muratara	21.350.000.000	1.502.000.000	205.740.000.000	561.467.000.000	355.726.000.000	545.766.000.000

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan(Data Diola

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan provinsi Sumatera Selatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2014.

Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio Keserasian dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah

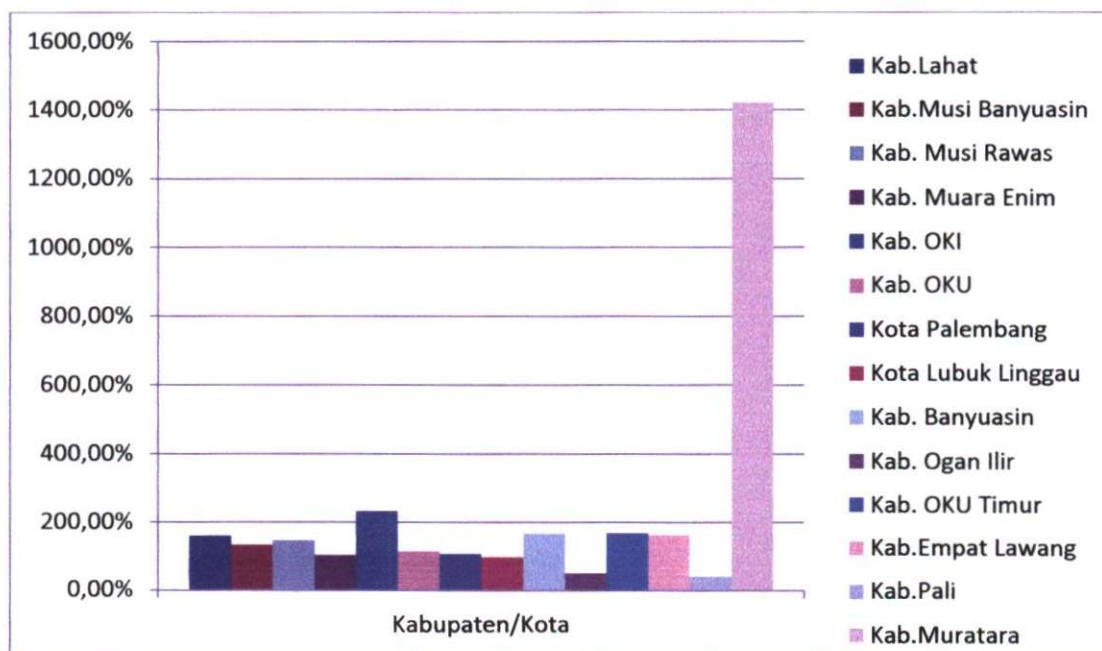
daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table IV.3
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

No	Kabupaten/Kota	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	REPAD	Kriteria
1	Kabupaten Lahat	125.319.000.000	79.066.000.000	158,49%	Efektif
2	Kabupaten Musi Banyuasin	172.925.000.000	129.225.000.000	133,81%	Efektif
3	Kabupaten Musi Rawas	120.153.000.000	81.732.000.000	147,00%	Efektif
4	Kabupaten Muara Enim	138.706.000.000	133.627.000.000	103,80%	Efektif
5	Kabupaten OKI	145.591.000.000	62.449.000.000	233,13%	Efektif
6	Kabupaten OKU	79.344.000.000	68.959.000.000	115,05%	Efektif
7	Kota Palembang	734.219.000.000	684.480.000.000	107,26%	Efektif
8	Kota Lubuk Linggau	50.181.000.000	51.603.000.000	97,24%	Tidak Efektif
9	Kabupaten Banyuasin	106.918.000.000	63.873.000.000	167,39%	Efektif
10	Kabupaten Ogan Ilir	49.061.000.000	95.980.000.000	51,12%	Tidak Efektif
11	Kabupaten OKU Timur	62.418.000.000	36.918.000.000	169,08%	Efektif
12	Kabupaten Empat Lawang	32.656.000.000	20.000.000.000	163,28%	Efektif
13	Kabupaten Pali	8.903.000.000	21.215.000.000	41,96%	Tidak Efektif
14	Kabupaten Muratara	21.350.000.000	1.502.000.000	1421,43%	Efektif

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan (Data Diolah)

Grafik IV. 1
Rasio Efektivitas PAD



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Grafik IV. 1 dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata sudah efektif karena rata rata rasionya lebih dari 100%. Kinerja Keuangan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Kabupaten dengan tingkat efektivitas yang tinggi, terbukti meski Kabupaten ini baru mengalami pemekaran kurang lebih 1 tahun lalu tetapi Kabupaten ini memiliki tingkat efektivitas tertinggi dengan rasio 1421,43%%. Banyaknya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten inilah yang menyumbangkan Pendapatan paling banyak. Kabupaten OKI merupakan Kabupaten kedua setelah Musi Rawas Utara dengan rasio sebesar 233,13%. Sedangkan

Rasio Efektivitas PAD paling rendah adalah Kabupaten Panukal abab lematang ilir dengan perolehan Rasio sebesar 41,96%. Kemudian disusul oleh Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah rasio sebesar 51,12%. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang dimiliki oleh Kabupaten Panukal abab lematang ilir dan Kabupaten Ogan Ilir tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan juga dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan pada tahun 2014. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

2. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (Belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini yaitu: Rasio Belanja Operasi dan rasio belanja modal.

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi dapat dihitung menggunakan rumus berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{TotalBelanjaOperasi}}{\text{TotalBelanjaDaerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.

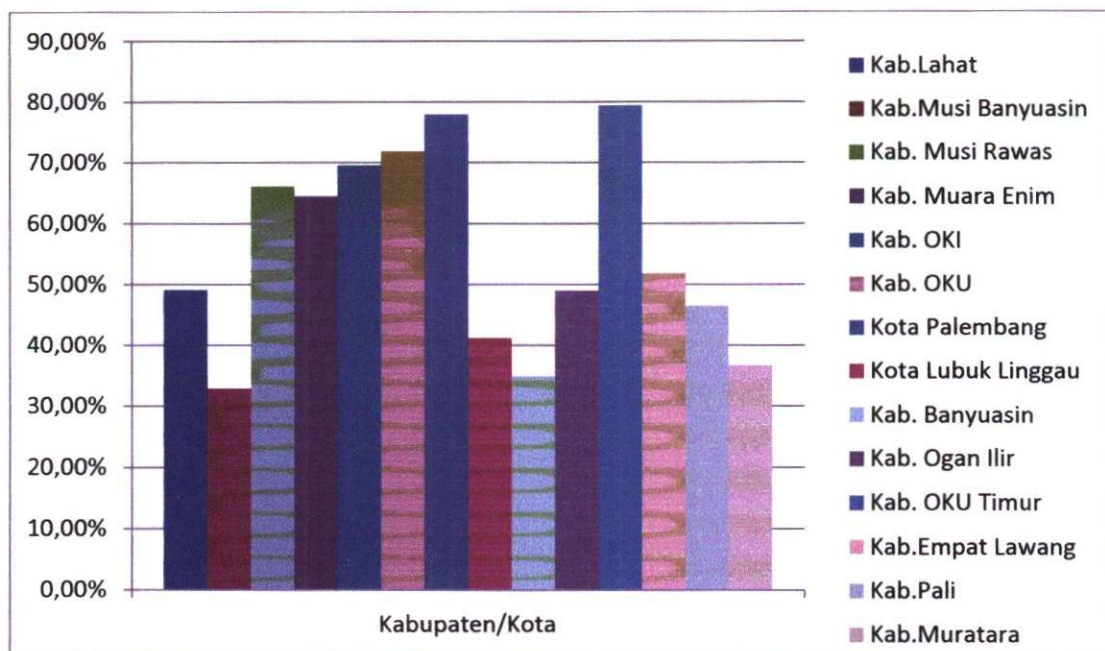
Hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada table berikut :

Table IV.4
Rasio Belanja Operasi

No	Kabupaten/Kota	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi
1	Kabupaten Lahat	681.541.000.000	1.388.480.000.000	49,08%
2	Kabupaten Musi Banyuasin	1.156.215.000.000	3.517.904.000.000	32,86%
3	Kabupaten Musi Rawas	805.210.000.000	1.218.716.000.000	66,07%
4	Kabupaten Muara Enim	1.149.353.000.000	1.783.782.000.000	64,43%
5	Kabupaten OKI	1.015.317.000.000	1.460.390.000.000	69,52%
6	Kabupaten OKU	740.870.000.000	1.031.869.000.000	71,79%
7	Kota Palembang	2.192.486.000.000	2.812.465.000.000	77,95%
8	Kota Lubuk Linggau	369.692.000.000	896.993.000.000	41,21%
9	Kabupaten Banyuasin	666.983.000.000	1.915.163.000.000	34,82%
10	Kabupaten Ogan Ilir	485.875.000.000	990.877.000.000	49,03%
11	Kabupaten OKU Timur	921.943.000.000	1.161.250.000.000	79,39%
12	Kabupaten Empat Lawang	415.919.000.000	801.818.000.000	51,87%
13	Kabupaten Pali	205.986.000.000	443.217.000.000	46,47%
14	Kabupaten Muratara	205.740.000.000	561.467.000.000	36,64%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Grafik IV.2
Rasio Belanja Operasi



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Grafik IV.2 diatas dapat diketahui bahwa rata rata Rasio Keserasian Belanja Operasi pada Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera selatan adalah sebesar 49,08%.

Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan jika dilihat dari Rasio Belanja Operasi maka peringkat pertama dimiliki oleh Kabupaten Oku Timur dengan perolehan rasio sebesar 79,39%. Kemudian di susul oleh Kota Palembang dengan perolehan rasio sebesar 77,95%. Sedangkan perolehan rasio belanja paling kecil di peroleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan perolehan rasio sebesar 32,86%. Kemudian disusul oleh Kabupaten Banyuasin dengan

perolehan rasio sebesar 34,82%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin mengeluarkan sedikit dana untuk keperluan investasi jangka pendek/ Belanja Rutin.

Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap total belanja operasi yang terjadi di kabupaten tersebut. Dengan demikian itu berarti Kabupaten Musi Banyuasi dan Kabupaten Banyuasin tidak condong memenu pada pengeluaran rutin. Itu juga bisa disebabkan karena Jumlah anggota dewan yang juga tidak membutuhkan biaya lebih dalam kegiatan kerjanya. Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin lebih membutuhkan investasi jangka panjang guna pembangunan wilayah tersebut. Maka dari itu pemerintah daerah lebih memberikan dana untuk investasi jangka panjangnya atau dalam belanja modal.

b. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka

menengah dan panjang juga bersifat rutin. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

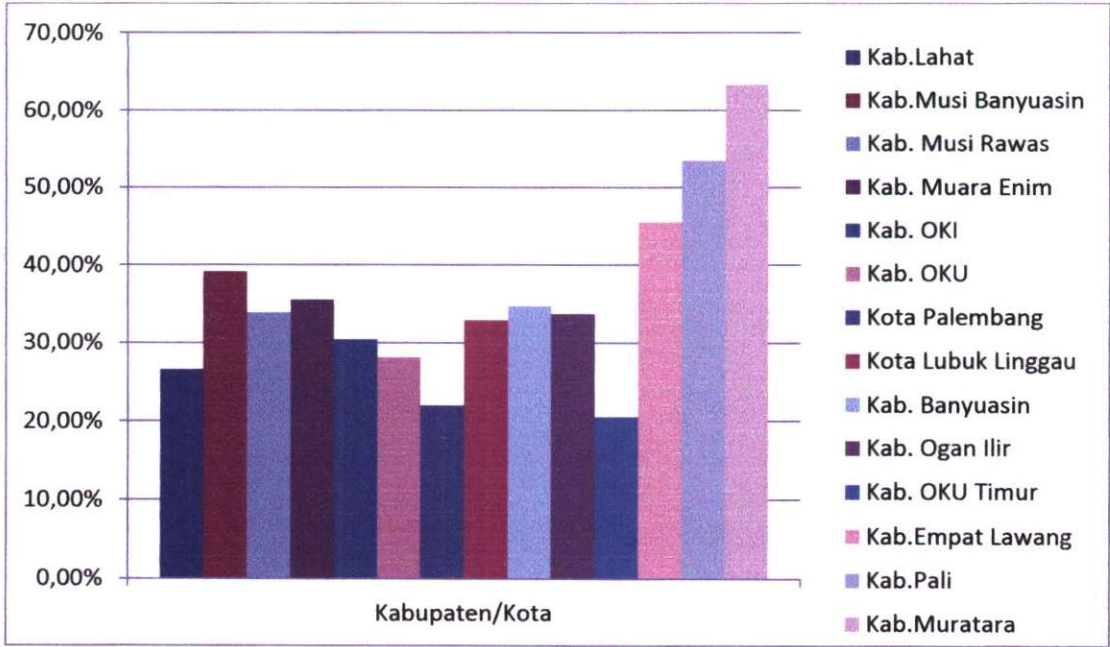
Hasil perhitungan Rasio Belanja Modal dapat dilihat pada table berikut:

Table IV. 5
Rasio Belanja Modal

No	Kabupaten/Kota	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal
1	Kabupaten Lahat	369.550.000.000	1.388.480.000.000	26,61%
2	Kabupaten Musi Banyuasin	1.377.481.000.000	3.517.904.000.000	39,15%
3	Kabupaten Musi Rawas	413.464.000.000	1.218.716.000.000	33,92%
4	Kabupaten Muara Enim	634.279.000.000	1.783.782.000.000	35,55%
5	Kabupaten OKI	444.998.000.000	1.460.390.000.000	30,47%
6	Kabupaten OKU	290.864.000.000	1.031.869.000.000	28,18%
7	Kota Palembang	618.887.000.000	2.812.465.000.000	22,00%
8	Kota Lubuk Linggau	295.111.000.000	896.993.000.000	32,90%
9	Kabupaten Banyuasin	653.603.000.000	1.915.163.000.000	34,73%
10	Kabupaten Ogan Ilir	334.233.000.000	990.877.000.000	33,73%
11	Kabupaten OKU Timur	238.864.000.000	1.161.250.000.000	20,56%
12	Kabupaten Empat Lawang	365.015.000.000	801.818.000.000	45,52%
13	Kabupaten Pali	237.231.000.000	443.217.000.000	53,52%
14	Kabupaten Muratara	355.726.000.000	561.467.000.000	63,35%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Grafik IV. 3
Rasio Belanja Modal



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Grafik IV.3 dapat diketahui bahwa rata rata Rasio Kesenjangan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 39,15 %. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh rasio terbaik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya dengan perolehan nilai rasio sebesar 63,35%. Kemudian disusul oleh Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir dengan perolehan rasio sebesar 53,52%. Sedangkan rasio belanja modal yang paling rendah di peroleh Kabupaten OKU Timur dengan perolehan rasio sebesar 20,56%. Kemudian disusul oleh Kota Palembang dengan perolehan rasio sebesar 22,00%. Hal ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir memiliki porsi belanja daerah dalam bentuk investasi yang tinggi karena Kabupaten ini baru saja melakukan pemekaran pada tanggal tahun 2013 lalu.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa Kabupaten OKU Timur dan Kota Palembang lebih sedikit memperoleh rasio belanja modal. Hal ini dikarenakan Kota Palembang adalah Kota yang maju dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Kota Palembang telah lebih dulu melakukan pembangunan dan tidak terlalu membutuhkan investasi jangka panjang. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih mengutamakan pembangunan untuk wilayah Kabupaten/Kota lain yang sedang membutuhkan pembangunan.

Menurut perhitungan dan uraian diatas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relative kecil . hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan

pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{PendapatanTransfer} \times 100\%$$

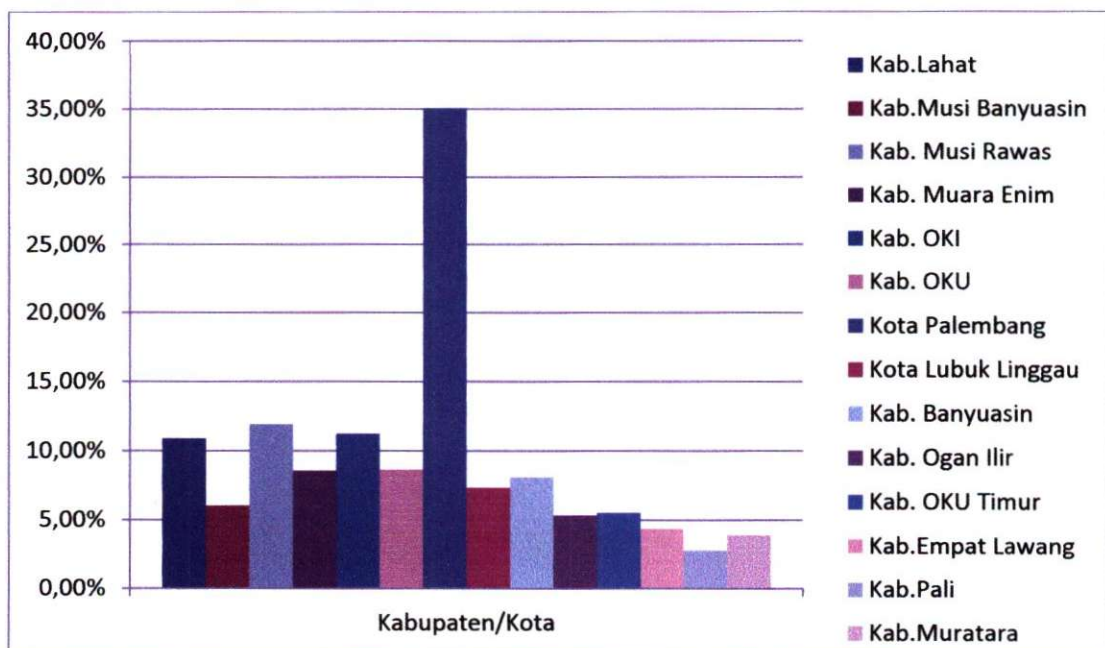
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada table berikut :

Table IV. 6
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Kabupaten/Kota	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD	Pola Hubungan
1	Kabupaten Lahat	125.319.000.000	1.146.946.000.000	10,92%	Instruktif
2	Kabupaten Musi Banyuasin	172.925.000.000	2.852.283.000.000	6,06%	Instruktif
3	Kabupaten Musi Rawas	120.153.000.000	1.005.661.000.000	11,94%	Instruktif
4	Kabupaten Muara Enim	138.706.000.000	1.613.012.000.000	8,59%	Instruktif
5	Kabupaten OKI	145.591.000.000	1.296.515.000.000	11,22%	Instruktif
6	Kabupaten OKU	79.344.000.000	913.783.000.000	8,68%	Instruktif
7	Kota Palembang	734.219.000.000	2.094.810.000.000	35,04%	Konsultatif
8	Kota Lubuk Linggau	50.181.000.000	681.430.000.000	7,36%	Instruktif
9	Kabupaten Banyuasin	106.918.000.000	1.316.854.000.000	8,11%	Instruktif
10	Kabupaten Ogan Ilir	49.061.000.000	916.616.000.000	5,35%	Instruktif
11	Kabupaten OKU Timur	62.418.000.000	1.126.467.000.000	5,54%	Instruktif
12	Kabupaten Empat Lawang	32.656.000.000	748.741.000.000	4,36%	Instruktif
13	Kabupaten Pali	8.903.000.000	319.965.000.000	2,78%	Instruktif
14	Kabupaten Muratara	21.350.000.000	545.766.000.000	3,91%	Instruktif

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Grafik IV. 4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan Tabel IV.11 diatas maka dapat dilihat bahwa rata rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 12,98%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa kemampuan Keuangan Kota Palembang lebih menonjol dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Rata rata pola hubunganya termasuk pola instuktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemadirian pemerintah daerah itu sendiri. Nilai terendah diperoleh oleh Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir dengan perolehan nilai 2,78% yang kemudian disusul oleh Kabupaten Musi Rawas Utara dengan perolehan

nilai 3,91%. Nilai tertinggi diperoleh oleh Kota Palembang dengan nilai 31,65%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir belum mampu Mandiri dengan sendirinya. Kurangnya anggota dewan dalam melakukan penagawasan bisa menjadi penyebab tidak tercapainya tingkat kemandirian itu sendiri. Untuk mewujudkan kemandirian itu diperlukan partisipasi masyarakat guna menjadikan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir agar lebih mandiri.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah masih bergantung oleh pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat). Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan pemerintah daerah sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintahan. Selain itu juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal itu pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sector yang paling potensial.

4. Kabupaten/Kota yang memiliki Kinerja paling baik

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah setelah diukur menggunakan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Belanja Modal, Rasio Belanja Operasi dan Rasio Kemandirian Kinerja Daerah dapat memberitahukan Kabupaten/Kota mana yang memiliki Kinerja Keuangan paling baik. Berikut rincian perhitungan masing-masing rasio tersebut.

Table IV. 7
Keseluruhan Rasio

No.	Kabupaten/Kota	Rasio Efektivitas PAD	Rasio Keserasian (Rasio Belanja Operasi)	Rasio Keserasian (Rasio Belanja Modal)	Rasio Kemandirian keuangan Daerah
1	Kabupaten Lahat	158,49%	49,08%	26,61%	10,92%
2	Kabupaten Musi Banyuasin	133,81%	32,86%	39,15%	6,06%
3	Kabupaten Musi Rawas	147,00%	66,07%	33,92%	11,94%
4	Kabupaten Muara Enim	103,80%	64,43%	35,55%	8,59%
5	Kabupaten OKI	233,13%	69,52%	30,47%	11,22%
6	Kabupaten OKU	115,05%	71,79%	28,18%	8,68%
7	Kota Palembang	107,26%	77,95%	22,00%	35,04%
8	Kota Lubuk Linggau	97,24%	41,21%	32,90%	7,36%
9	Kabupaten Banyuasin	167,39%	34,82%	34,73%	8,11%
10	Kabupaten Ogan Ilir	51,11%	49,03%	33,73%	5,35%
11	Kabupaten OKU Timur	169,07%	79,39%	20,56%	5,54%
12	Kabupaten Empat Lawang	163,28%	51,87%	45,52%	4,36%
13	Kabupaten Pali	41,96%	46,47%	53,52%	2,78%
14	Kabupaten Muratara	1421,43%	36,64%	63,35%	3,91%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah)

Berdasarkan table IV. 6 dapat dilihat bahwa beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Diantaranya adalah Kabupaten OKI, Kota Palembang, Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Pali dan Kabupaten Muratara. Namun dari sekian banyak Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja keuangan yang baik hanya Kota Palembang yang memiliki Kinerja Keuangan paling baik. Hal ini wajar karena Kota Palembang merupakan ibukota dari provinsi Sumatera Selatan itu sendiri.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan

- a. Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD tergolong efektif. Karena rata rata efektivitasnya lebih dari 100%. Kabupaten/Kota yang memiliki Rasio tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas Utara dengan perolehan rasio sebesar 1421,43%.
- b. Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan jika dilihat dari Rasio Belanja Operasi masih banyak mengalokasikan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal dengan jumlah rata rata rasio belanja operasi adalah sebesar 77,11%.
- c. Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan jika dilihat dari Rasio Belanja Modal masih banyak mengalokasikan belanja operasi dibandingkan dengan

belanja modal itu sendiri. Rata rata rasio belanja modal sebesar 50,01%.

- d. Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera selatan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instuktif. Rata-rata Rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 12,98%.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang paling baik dimiliki oleh Kota Palembang jika dilihat dari keempat rasio yang digunakan.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain : dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan mampu memaksimalkan potensi tersebut , maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan

pendapatan asli daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan juga seharusnya tidak harus selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepanya kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan dapat tumbuh menjadi mandiri, mampu mengelola keuangannya sendiri dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah . Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bias menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari satu provinsi saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fidelius. 2013. Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal*, Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke-4. Salemba Empat. Jakarta.
- [Http://djpk.depkeu.go.id](http://djpk.depkeu.go.id)
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke-2. Yogyakarta, UPP STIK YKPN.
- Mahsun, Muhammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi ke-4. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2009, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : BPFE
- Patriati, Ratri. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Jurnal*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Pramita, Puput Rizki. Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2009-2013. *Jurnal* , UNY. Yogyakarta.
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah kota Surakarta). *Jurnal*. Dosen tetap STIE AMA SALATIGA.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS)*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan kelimabelas. Bandung. Alfabeta.

Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Undang-Undang No.17 tahun 2003. *Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD*. Jakarta

ATA APBD TA 2014 *)
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Prov.SumSel	Kab. Lahat	Kab. Muba	Kab. Mura	M.enim	Kab. OKI	Kab. OKU	Kota Pig	K. Prabu	P.Alam	Linggau	banyuasin	Kab.ol	Kab. OKU T	Kab.OKU S	Kab.Empa t	Kab. Pali	Muratara
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dapatan	7.136.876	1.348.832	3.529.591	1.082.764	1.730.301	1.498.818	1.065.658	2.945.004	781.688	673.753	940.668	1.612.021	1.284.185	1.173.084	856.337	736.494	326.864	543.727
PAD	2.482.129	79.066	129.225	81.732	133.627	62.449	68.959	684.480	51.875	34.180	51.603	63.873	95.980	36.918	21.360	20.000	21.215	1.502
Pajak daerah	2.275.320	25.758	39.268	13.015	34.349	16.907	21.550	388.859	17.005	6.787	21.377	24.370	71.865	11.686	3.790	8.322	11.462	
Retribusi daerah	16.671	25.308	3.459	9.639	13.306	6.163	9.253	157.003	4.880	2.638	6.897	29.929	7.115	11.133	8.944	1.003	6.210	
Hasil pengelolaan kekayaan daerah	113.471	8.000	11.294	9.000	13.616	6.500	4.064	48.000	1.000	3.787	2.000	2.810		750	1.500	5.500		
Lain-lain PAD yang sah	76.666	20.000	75.205	50.078	72.356	32.879	34.091	90.618	28.990	20.969	21.329	6.764	17.000	13.349	7.125	5.175	3.543	1.502
Dana Perimbangan	3.841.412	1.068.148	3.289.966	882.138	1.406.867	1.251.107	861.581	1.575.059	641.211	585.509	693.789	1.283.390	1.050.426	960.277	761.668	651.895	271.029	513.693
DBH	2.793.114	370.075	2.854.018	378.744	753.698	231.078	283.544	305.340	225.361	194.064	234.993	346.904	414.918	212.500	188.951	228.144	160.642	229.284
DAU	985.543	615.240	411.870	420.562	593.564	931.159	568.771	1.203.662	383.314	354.727	414.758	824.219	561.377	680.714	512.126	360.872	110.387	284.409
DAK	62.755	82.832	24.078	82.831	59.604	88.871	9.266	66.056	32.536	36.717	44.038	112.268	74.131	67.063	60.591	62.879		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	813.335	201.619	110.401	118.894	189.807	185.262	135.118	685.465	88.601	54.064	195.276	264.757	137.779	175.889	73.310	64.599	34.621	28.531
Hibah				591				27.612					10.000		680		5.000	15.000
Dana darurat																		
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya		24.834	30.403	16.889	58.047	30.558	27.480	144.636	25.176	19.310	24.047	28.712	24.011	26.369	13.563	16.249		
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	813.335	128.214	69.981	84.761	106.727	29.235	17.458	470.639	6.831	31.205	54.292	217.691	72.038	131.398	34.328	28.587	19.621	13.492
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya		48.571	10.016	16.653	25.033	125.468	90.180	42.578	56.595	3.550	116.936	18.354	31.730	18.121	24.740	19.763	10.000	
Lain-lain																		39
lanja	6.501.272	1.424.995	3.697.531	1.198.218	1.881.095	1.494.944	1.134.108	2.998.069	845.930	697.800	991.674	1.751.622	1.224.078	1.186.180	904.222	777.964	328.720	543.751
Belanja Tidak Langsung	4.273.129	797.575	1.197.569	403.791	735.246	739.231	535.184	1.582.122	364.724	289.679	385.793	692.938	534.723	682.292	404.425	277.556	111.438	115.256
Belanja Pegawai	806.382	719.121	764.569	349.286	605.710	627.201	500.443	1.560.266	358.757	280.843	356.212	589.651	489.361	562.834	363.008	244.475	92.028	96.120
Belanja Bunga					1.592													
Belanja Subsidi			17.000	2.000	2.800	1.345		8.597		1.500				1.500		600		
Belanja Hibah	1.539.864	39.600	67.866	15.050	32.721	20.324	11.144	9.479	2.904	5.836	25.103	28.747	6.484	29.583	5.189	4.945		3.423
Belanja Bantuan sosial	600	4.000	2.780	2.010	5.620	5.385	1.310	780	316	500	2.479	10.596	2.224	3.009	251	970	4.575	488
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	600.000			500		31.182							501					
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	1.292.382	33.754	341.148	32.946	76.803	52.795	19.774	1.000	2.069		500	58.895	32.152	77.131	27.647	16.566	14.835	12.225
Belanja tidak terduga	33.900	1.100	4.206	2.000	10.000	1.000	2.514	2.000	679	1.000	1.500	5.050	4.000	8.236	8.330	10.000		3.000
Belanja Langsung	2.228.143	627.420	2.499.963	794.427	1.145.849	755.713	598.924	1.415.948	481.207	408.121	605.881	1.058.684	689.355	503.888	499.796	500.408	217.282	428.495

Belanja Pegawai	30.790	98.246	128.506	60.195	48.145	25.881	29.686	84.557	17.163	16.258	14.907	57.964	20.959	19.311	19.460	14.870	4.874	20.798
Belanja Barang dan jasa	1.275.079	273.860	874.194	275.398	448.548	288.677	259.727	663.357	208.322	189.368	200.915	457.731	193.153	232.256	165.202	195.832	71.367	121.375
Belanja Modal	922.274	255.315	1.497.263	458.834	649.156	441.154	309.511	668.034	255.722	202.494	390.058	542.989	475.242	252.320	315.134	289.706	141.041	286.322
Pembayaran Netto	(635.604)	76.163	167.940	115.455	150.794	(3.875)	68.451	53.566	64.243	24.047	51.007	139.601	(60.106)	13.096	47.884	41.470	1.856	24
Penerimaan Pembayaran	280.691	82.163	227.840	168.075	294.991	31.935	72.846	94.510	66.000	35.047	56.007	179.000	66.000	15.596	51.884	46.470	1.856	24
SILPA TA sebelumnya	280.691	70.768	211.775	132.926	177.470	17.956	61.393	41.007	55.848	28.269	47.000	179.000	58.000	5.788	45.000	40.417	1.856	24
Pencairan dana cadangan																		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan																		
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah					97.317													
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		11.395	16.065	35.149	20.204	13.979	11.453	53.504	10.152	6.778	9.007		8.000	9.808	6.884	6.053		
Pengeluaran Pembayaran	916.295	6.000	59.900	52.620	144.197	35.809	4.395	40.944	1.758	11.000	5.000	39.399	126.106	2.500	4.000	5.000		
Pembentukan Dana Cadangan					19.860													
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	187.873	6.000	59.900		124.338	12.250	4.000	34.944	1.000	11.000	5.000	5.000	6.600	2.500	4.000	5.000		
Pembayaran Pokok Utang	728.422			52.620		23.059		6.000	758			34.399	119.506					
Pemberian Pinjaman Daerah						500												
Pembayaran Kegiatan Lanjutan																		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga							395											

Keterangan:

Data per 29 September 2014

Realisasi APBD TA 2014 Format SAP

(dalam rupiah)

Pendapatan	6.252.136	1.141.591	1.797.921	1.577.431
Pendapatan Asli Daerah	2.422.674	120.153	138.706	145.591
Pajak daerah	2.267.780	45.849	47.807	80.465
Retribusi daerah	11.423	3.122	13.680	6.749
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	30.668	453	3.844	554
Lain-lain PAD yang sah	112.803	70.729	73.375	57.822
Pendapatan Transfer	3.809.214	1.005.661	1.613.012	1.296.515
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.982.866	934.130	1.475.620	1.279.108
Dana Bagi Hasil Pajak	548.898	118.486	380.940	54.351
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.385.671	312.251	441.511	204.727
Dana Alokasi Umum	985.543	420.562	593.564	931.159
Dana Alokasi Khusus	62.755	82.831	59.604	88.871
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	826.348	49.538	109.485	-
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	826.348	49.538	109.485	-
Transfer Pemerintah Provinsi	-	21.992	27.906	17.407
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	21.992	27.906	17.407
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	20.249	15.778	46.203	135.326
Pendapatan Hibah	20.249	474	1.500	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	15.304	44.703	135.326
Belanja	5.513.061	1.218.716	1.783.782	1.460.390
Belanja Operasi	4.778.821	805.210	1.149.353	1.015.317
Belanja Pegawai	776.253	512.179	646.342	646.525
Belanja Barang	1.014.127	248.779	381.712	308.653
Belanja Bunga	-	-	3.518	-
Belanja Subsidi	-	-	3.826	1.230
Belanja Hibah	1.574.378	10.557	30.971	9.870
Belanja Bantuan Sosial	513	1.785	5.550	3.320

Belanja Modal	290.864	618.887	238.864	365.015	237.231	355.726
Tanah	-	12.780	-	5.450	1.412	2.033
Peralatan dan Mesin	23.280	100.766	28.890	39.409	51.657	56.857
Gedung dan Bangunan	23.131	106.414	49.283	66.414	17.874	36.422
Jalan, irigasi dan jaringan	242.984	350.551	155.796	252.246	165.914	258.570
Aset tetap lainnya	1.470	48.376	4.895	1.496	375	1.815
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	-	-	-	-	-	30
Belanja Tidak Terduga	134	1.093	443	20.884	-	-
Belanja Tidak Terduga	134	1.093	443	20.884	-	-
Transfer	-	-	-	16.564	-	-
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	16.564	-	-
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	1.031.869	2.812.465	1.161.250	818.382	443.217	561.467
Pembiayaan	57.012	26.027	(12.938)	75.789	1.856	-
Penerimaan Pembiayaan	73.081	101.184	72	85.789	1.856	-
SILPA TA sebelumnya	73.081	101.184	72	79.736	1.856	-
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	6.053	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	16.068	75.157	13.011	10.000	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	69.549	2.693	10.000	-	-
Pembayaran Pokok Utang	16.068	5.608	10.318	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-

Realisasi APBD TA 2014 Format Permendagri*(dalam jutaan rupiah)*

	Kab. Pangasinan	Kab. Pangasinan	Kota. Lubuk Linggau	Kab. Pangasinan	Kab. Pangasinan
Pendapatan	1.534.399	3.143.670	919.071	1.833.038	1.071.163
PAD	125.319	172.925	50.181	106.918	49.061
Pajak daerah	57.855	61.581	17.858	51.699	10.555
Retribusi daerah	36.755	8.059	6.284	10.912	4.922
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	406	1.990	127	223	-
Lain-lain PAD yang sah	30.303	101.295	25.912	44.083	33.584
Daper	1.146.946	2.852.283	681.430	1.316.854	916.616
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	448.874	2.416.336	222.634	380.367	281.108
Dana Alokasi Umum	615.240	411.870	414.758	824.219	561.377
Dana Alokasi Khusus	82.832	24.078	44.038	112.268	74.131
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	262.133	118.462	187.459	409.267	105.486
Hibah	-	-	1.200	-	356
Dana darurat	-	-	-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	32.546	20.832	19.385	16.217	11.787
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	109.109	80.424	58.220	195.029	76.181
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	120.479	17.206	108.654	198.021	17.162
Lain-lain	-	-	-	-	-
Belanja	1.388.480	3.517.904	896.993	1.915.163	990.877
Belanja Tidak Langsung	681.541	1.156.215	369.692	666.983	485.875
Belanja Pegawai	619.626	722.896	344.933	586.857	445.686
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	26.929	-	-	-
Belanja Hibah	25.584	63.086	22.220	15.376	6.337
Belanja Bantuan Sosial	1.765	3.613	1.701	6.074	820
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	-	-	-	-	187
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	33.487	339.548	497	58.675	32.707
Belanja Tidak Terduga	1.080	143	341	-	137
Belanja Langsung	706.938	2.361.690	527.301	1.248.180	505.001
Belanja Pegawai	63.232	107.002	15.304	54.000	14.767
Belanja Barang dan jasa	274.156	877.207	216.885	540.577	156.001

	2018-19	455.991	(811)	162.620	(61.269)
Penerimaan	46.487	515.191	16.412	196.562	65.570
SILPA TA sebelumnya	13.203	499.788	16.382	185.414	61.571
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	15.400	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	33.284	4	30	11.147	4.000
Pengeluaran	15.647	61.200	17.223	33.942	126.839
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.000	61.200	4.950	5.000	6.599
Pembayaran Pokok Utang	9.647	-	12.273	28.942	120.240
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-

Realisasi APBD TA 2014 Format SAP

(dalam rupiah)

Pendapatan	1.083.701	2.929.034	1.212.513	781.398	457.641	629.920
Pendapatan Asli Daerah	79.344	734.219	62.418	32.656	8.903	21.350
Pajak daerah	23.887	463.575	17.633	11.868	2.924	7.435
Retribusi daerah	6.407	85.109	6.797	3.100	4.961	395
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	262	28.021	74	255	-	-
Lain-lain PAD yang sah	48.789	157.513	37.914	17.433	1.018	13.520
Pendapatan Transfer	913.783	2.094.810	1.126.467	748.741	319.965	545.766
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	888.714	1.545.295	973.127	643.666	303.260	532.006
Dana Bagi Hasil Pajak	69.761	95.285	225.350	21.801	64.503	65.936
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	240.916	196.805	-	198.034	128.369	181.661
Dana Alokasi Umum	568.771	1.203.662	680.714	360.872	110.387	284.409
Dana Alokasi Khusus	9.266	49.542	67.063	62.879	-	-
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	426.003	130.978	33.167	16.705	13.760
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	-	426.003	130.978	33.167	16.705	13.760
Transfer Pemerintah Provinsi	25.069	123.512	22.362	71.909	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25.069	123.512	22.362	8.220	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	63.689	-	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	90.573	100.006	23.628	-	128.773	62.804
Pendapatan Hibah	-	12.362	-	-	10.000	5.000
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	90.573	87.644	23.628	-	118.773	57.804
Belanja	1.031.869	2.812.465	1.161.250	801.818	443.217	561.467
Belanja Operasi	740.870	2.192.486	921.943	415.919	205.986	205.740
Belanja Pegawai	464.038	1.508.876	577.666	217.910	90.872	90.795
Belanja Barang	245.563	664.899	236.302	192.633	89.924	97.574
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	8.597	1.350	600	-	-
Belanja Hibah	9.217	6.575	28.333	3.791	2.338	4.220
Belanja Bantuan Sosial	605	2.677	2.489	985	917	868

Belanja Modal	733.382	413.464	634.279	444.998
Tanah	77.643	5.744	1.759	2.352
Peralatan dan Mesin	99.082	23.057	68.738	40.086
Gedung dan Bangunan	78.679	72.912	210.369	57.776
Jalan, irigasi dan Jaringan	473.564	309.121	349.176	340.643
Aset tetap lainnya	1.153	2.630	2.275	4.141
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Aset lainnya	3.260	-	1.962	-
Belanja Tidak Terduga	858	43	149	75
Belanja Tidak Terduga	858	43	149	75
Transfer	268.509	474	-	31.182
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	268.509	474	-	1.803
Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	29.378
Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-
Transfer Lainnya ke Kab/Kota/Desa	-	-	-	-
Belanja dan Transfer	5.781.570	1.219.190	1.783.782	1.491.571
Pembiayaan	(431.727)	135.978	123.267	(15.825)
Penerimaan Pembiayaan	10.179	188.533	216.953	13.234
SILPA TA sebelumnya	10.179	188.504	196.513	3.909
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	-	-	9.279
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	29	20.440	46
Pengeluaran Pembiayaan	441.906	52.554	93.686	29.059
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	34.860	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	87.873	-	48.651	6.000
Pembayaran Pokok Utang	354.034	52.554	10.176	23.059
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Rahmawati
Place/Date of Birth	:	Banyuasin, August 16th 1994
Test Times Taken	:	+3
Test Date	:	August, 31st 2016

Scaled Score

Listening Comprehension	:	46
Structure Grammar	:	39
Reading Comprehension	:	37
OVERALL SCORE	:	407

Palembang, September, 02nd 2016
Chairperson of Language Laboratory

Rini Susanti, S.Pd., M.A

No. 786/TEA FE/LB/UMP/IX/2016

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

123 certificates



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : RAHMAWATI
NIM : 222012256
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (15) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 01/٢٠١٦/ أبريل
an. Dekan



Wakil Dekan IV

Drs. Antoni M.H.I.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI



PIAGAM

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : RAHMAWATI
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012256
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : BANYUASIN, 16-08-1994

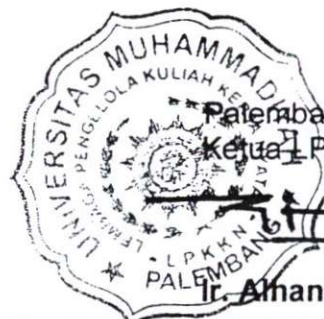
telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Kedaton
Kecamatan : Kayuagung
Kota/Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Dinyatakan : Lulus



Mengetahui

H. M. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 30 September 2015

Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/II / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/ I / 2014 (B)
Nomor : 1252 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/ 2015 (B)

Website : fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Agustus 2016
Pukul : 13:00 s/d 17:00 wib
Nama : Rahmawati
NIM : 22 2012 256
Program Studi : Akuntansi
Bidang Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Pembimbing	21/09/2016	
2	Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Ketua Penguji	21/09/2016	
3	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji 1	21/9/2016	
4	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Penguji 2	20/9/2016	

Palembang, September 2016
Dekan,
u.b Kota Program Studi Akuntansi



Beti Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Telp. (0711) 511433 Fax. 518018 Palembang 30263

SURAT KETERANGAN
Nomor : 016/F-10/FEB-UMP/VI/2016

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Menerangkan bahwa :

Nama	: Rahmawati
NIM	: 222012256
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan riset/pengambilan data di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui website <http://djpk.depkeu.go.id> dan diketahui oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Surat keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 6 Agustus 2016

An Dekan
Kepala Tata Usaha



Paripurna S.Pd
NIM. 859185

SURAT KETERANGAN
No. 470 / Abstract/LB/UMP/VIII/2016

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : FINZA LARASATI, S.Pd., M.Pd.
Status : Dosen FKIP UMP Program Studi Bahasa Inggris
NIDN : -
Alamat : Jl. Cinde Welan Lr. Kebon No.41 RT.12A RW.03 Palembang
No. Telpon : 081380004861

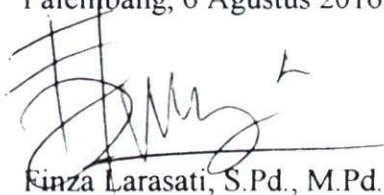
Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan:

Nama : Rahmawati
NIM : 222012256
Judul skripsi : Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Telah dikoreksi terjemahan abstraknya sehingga telah memenuhi kriteria penulisan abstrak dalam Bahasa Inggris.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 6 Agustus 2016


Finza Larasati, S.Pd., M.Pd.

DAFTAR HADIR SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI AKUTANSI

0

Nama : RAHMAWATI
 NIM : 222012256
 Program Studi : AKUTANSI
 Hari / Tanggal : RABU / 01 Juni 2016
 Pukul : 10.00 WIB
 Judul : PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN /KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	Uun. Novianti	22 2012 054	1 Uun
2	Stei. Aminah	22 2012 066	2 Amn
3	Deska Iestari	22 2013 026	3 Des
4	MIA ARIKA SARI	22 2013 4838	4 Mia
5	Ade Wijayanto	22. 2012. 083	5 Ade
6	Nanda Julzistika	22. 2012. 080	6 Nanda
7	Yosi Rizka	22 2012. 342	7 Yosi
8	Ranti Puspita Sari	22 2012 112	8 Ranti
9	Evi Dwi Wahyuni	22 2013 165	9 Evi
10	Eka Silmi Damaristi	22 2013 271	10 Eka
11	ADI SUSWANDI SAPUTRA		11 Adi
12	Mardani Nursali	22. 2012. 110	12 Mardani
13	Dikky Ardi Saputra		13 Dikky
14	Mohammad Fakhroang		14 Fakhroang
15	Ahmad Habib Al Hilmi	22 2013 280	15 Ahmad

ditetapkan : di Palembang
 tanggal : 27 Mei 2016

a.n Dekan
 Ketua Program Studi Akutansi,



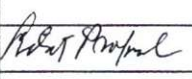
Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA

BERITA ACARA SEMINAR USULAN PENELITIAN

Telah dilaksanakan Seminar Usulan Penelitian mahasiswa :

Nama : RAHMAWATI
NIM : 222012256
Program Studi : AKUNTANSI
Hari / Tanggal : RABU / 01 Juni 2016
Pukul : 10.00 WIB
Judul : PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN /KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dengan Penelaah sebagai berikut :

NO	NAMA	TANDA TANGAN PEMBIMBING / PENELAAH	SARAN / PERBAIKAN
1	Drs.Sunardi ,S.E, M.Si	1 	
2	H. M. Basyaruddin , R, S.E, Ak, M.Si	2 	
3	Mizan, S.E., M.Si, Ak	3 	

Hasil Seminar :

1. Disetujui tanpa perbaikan
2. Disetujui dengan perbaikan
3. Ditolak/ubah materi UP/Seminar UP kembali

ditetapkan : di Palembang
tanggal : 27 Mei 2016

a.n Dekan
Ketua Program Studi Akutansi,



[illegible]



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	Rahmawati	PEMBIMBING
NIM :	22 2012 256	KETUA : Drs. Sunardi, S.E., M.Si
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI :	Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Selatan	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	20-6-2016	Bab I, II, III			Pabrik
2	18-7-2016	Bab I, II, III			Pabrik Ace
3	15-7-2016	Bab IV			Pabrik
4	26-7-2016	Bab IV			Pabrik
5	30-7-2016	Bab IV			Ace
6	3-8-2016	Bab V			Ace
7	6-8-2016	Akhir all			Ace
8					Ujain kumpul
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Dikeluarkan di Palembang



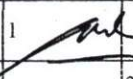
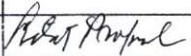
Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA

BERITA ACARA SEMINAR USULAN PENELITIAN

Telah dilaksanakan Seminar Usulan Penelitian mahasiswa :

Nama : RAHMAWATI
NIM : 222012256
Program Studi : AKUNTANSI
Hari / Tanggal : RABU / 01 Juni 2016
Pukul : 10.00 WIB
Judul : PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN /KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dengan Penelaah sebagai berikut :

NO	NAMA	TANDA TANGAN PEMBIMBING / PENELAAH	SARAN / PERBAIKAN
1	Drs.Sunardi ,S.E, M.Si	1 	
2	H. M. Basyaruddin , R, S.E, Ak, M.Si	2 	
3	Mizan, S.E., M.Si, Ak	3 	

Hasil Seminar :

1. Disetujui tanpa perbaikan
2. Disetujui dengan perbaikan
3. Ditolak/ubah materi UP/Seminar UP kembali

ditetapkan : di Palembang
tanggal : 27 Mei 2016

a.n Dekan
Ketua Program Studi Akutansi,



BIODATA PENULIS

Nama : Rahmawati

NIM : 222012256

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Banyuasin, 16 Agustus 1994

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Jl. KH.Ahmad Dahlan Aspol Blok B.15 Bukit Kecil Palembang

Pendidikan : - SD Negeri 3 Pancamukti
- SMP Negeri 1 Muara Telang
- SMK Negeri 1 Palembang

No. Telp/HP : 0813-6863-2649

E-mail : Rahmawati.ringgit123@gmail.com

Pekerjaan : Mahasiswi

Nama Orangtua :

Ayah : Alm. Rohmat

Ibu : Satini

Pekerjaan Orangtua :

Ayah :

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orangtua : Desa Pancamukti, Jalur 8. Jembatan2. Rt.26 Rw.01.

Penulis

Rahmawati